

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI
KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ALFIANI

E051 191 072



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI
KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ALFIANI

E051 191 072

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si
NIP. 19570707 198403 1 005

Pembimbing II

Ashar Prawitno, S.IP. M.Si
NIP. 19900110 201904 3 001

Mengetahui

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI
KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NURUL ALFIANI

E051 191 072

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Makassar, 24 Oktober 2023

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(<i>Rasyid</i>)
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP. M.Si	(<i>Ashar</i>)
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	(<i>Lukman</i>)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(<i>Rahmatullah</i>)
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(<i>Rasyid</i>)
Pembimbing Kedua	: Ashar Prawitno, S.IP. M.Si	(<i>Ashar</i>)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Alfiani

NIM : E051191072

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI
KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Alfiani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, sang revolusioner, idola seluruh umat muslim yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Meskipun demikian, tentunya penulis juga memiliki tekad dan niat yang kokoh agar mampu menghasilkan skripsi yang baik dan bermanfaat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sering dipertemukan dengan berbagai hambatan, Namun hambatan itulah yang membuat penulis semangat untuk bangkit dan meneruskan apa yang penulis telah mulai sampai sejauh ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Mengga Sijampa dan Ibu Hasniati Tenna, serta saudara-saudari penulis Nurlina, Alianda, dan Nurdiyanti. Terima Kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, nasihat, serta harapan mulia yang membuat penulis termotivasi agar bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan. Aamiin.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meraih menempuh pendidikan dan meraih gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir ini (Skripsi).

4. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak.
5. Ashar Prawitno, S. IP. M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak.
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah, S.IP, M.Si, Afni, S.IP, M.Si yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

8. Para staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam pelayanan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam pelayanan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dengan baik serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam sesi wawancara dan pengumpulan data.
11. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas atas ruang belajar selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman “Zeitgeist 2019” yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan terima kasih untuk kebersamaan dari awal kuliah sampai menyandang gelar sarjana. Terima kasih untuk pengalaman, pelajaran hidup, bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman penulis Ila, Umi, Indah, Aldi, Stevy, Venike, Inna, Lala, Lili, Lulu, Puput, Pute, Rizka, Tisa, terima kasih telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, serta menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian.

14. Teman-teman penulis Thatia, Aining, Ainun, Pede, Lulu, Lea, Safa, terima kasih atas kebersamaan, semangat, motivasi, serta bantuan yang diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman UKM *Sospol Dance Club (Sodec)* FISIP Unhas, terima kasih telah memberikan wadah untuk mengembangkan bakat penulis serta pengalaman dan kebersamaannya.
16. Kepada Wahyu Karunia Galib terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, you're the best support system.
17. Teman-teman KKNT PUPR Gowa (Kelurahan Bontoramba) gelombang 108, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga kita masih punya waktu untuk dapat bertemu kembali.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makasssar, 5 Juli 2023

Nurul Alfiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	9
1. 3 Tujuan Penelitian	10
1. 4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2. 1 Peran Pemerintah Daerah	11
2. 1. 1 Konsep Peran	11
2. 1. 2 Konsep Pemerintah Daerah	12

2. 1. 3 Fungsi, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Daerah	14
2. 2 Pelayanan Publik	17
2. 2. 1 Konsep Pelayanan Publik	17
2. 2. 2 Prinsip – Prinsip Pelayanan Publik	18
2. 2. 3 Asas Pelayanan Publik	20
2. 3 Penyediaan Air bersih	21
2. 3. 1 Pengertian Air Bersih	21
2. 3. 2 Sistem Penyediaan Air Bersih	24
2. 3. 3 Pesyaratan Dalam Penyediaan Air Bersih	28
2. 4 Kerangka Konsep	32
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
3. 1 Tipe Dasar Penelitian	33
3. 2 Lokasi Penelitian	33
3. 3 Fokus Penelitian	34
3. 3. 1 Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Penyediaan Air Bersih	34
3. 3. 2 Faktor-faktor Penyediaan Air Bersih	36
3. 4 Sumber Data	37
3. 5 Teknik Pengumpulan Data	38
3. 6 Analisis Data	39

BAB IV.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4. 1. 1 Gambaran Umum Kota Makassar	41
4. 1. 2 Letak Geografis Kota Makassar.....	41
4. 1. 3 Kondisi Demografi Kota Makassar.....	44
4. 1. 4 Visi dan Misi Kota Makassar.....	46
4. 2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	47
4. 2. 1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	47
4. 2. 2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	48
4. 2. 3 Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	48
4. 2. 4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	50
4. 3 Gambaran Umum Kelurahan Untia	57
4. 3. 1 Letak Geografis Kelurahan Untia.....	57
4. 3. 2 Kondisi Demografi Kelurahan Untia.....	58
4. 3. 3 Struktur Organisasi Kelurahan Untia	60
4. 4 Pembahasan dan Hasil Penelitian	61

4. 4. 1 Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.....	61
4. 4. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyediaan Air Bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar .	97
BAB V	110
KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5. 1 Kesimpulan	110
5. 2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Kota Makassar Tahun 2018-2021	4
Tabel 2 Kebutuhan Air Bersih Kawasan Industri Makassar	6
Tabel 3 Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan	43
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar pada tahun 2021.....	45
Tabel 5 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	57
Tabel 6 Jumlah Penduduk, Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.....	59
Tabel 7 Keadaan Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	59
Tabel 8 Rencana Kerja/Kegiatan dan Pendanaan Bidang Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	65
Tabel 9 Data Wilayah Terlayani Air Bersih Di Kota Makassar	68
Tabel 10 Kebutuhan Air Bersih Kelurahan Untia	74
Tabel 11 Data Program Kegiatan Bidang Air Bersih.....	80
Tabel 12 Data Pamsimas Yang Berfungsi dan Tidak Berfungsi Di Kota Makassar.....	89
Tabel 13 Pendanaan Bidang Air Bersih.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Makassar.....	42
Gambar 2 Sturuktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	50
Gambar 3 Peta wilayah Kelurahan Untia.....	58
Gambar 4 Bagan struktur organisasi Kelurahan Untia	60
Gambar 5 Surat permohonan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	75
Gambar 6 Pengawasan kegiatan bidang air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	95
Gambar 7 Dokumentasi PDAM Kota Makassar menyalurkan air bersih di Kelurahan Untia	103

ABSTRAK

NURUL ALFIANI, Nomor Induk Mahasiswa E051191072, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar** (Dibimbing Oleh Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP. M.Si).

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sumber daya air merupakan kebutuhan sangat mendasar dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal penyediaan air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih memiliki indikator peran, yaitu (1) perencanaan kegiatan di bidang air bersih, (2) pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih, (3) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum masih belum optimal. Hal ini didasari kondisi wilayah Kelurahan Untia yang berada di wilayah pesisir sehingga penyediaan air bersih melalui sistem pengeboran masih sulit untuk mendapatkan air bersih. Berdasarkan hasil analisis data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan penyediaan air bersih, yaitu menyediakan prasarana air bersih berupa alat atau mesin yang dapat mengurangi kadar garam di bawah tanah untuk di daerah pesisir, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi penyedia air bersih, dan membuat rencana induk untuk penyediaan air bersih yang lebih terencana dan terpadu.

Kata Kunci: Air Bersih, Penyediaan, Peran Pemerintah

ABSTRACT

NURUL ALFIANI, Student Identification Number E051191072, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the Title: **The Role of Local Government in the Provision of Clean Water in Untia Village, Biringkanaya District, Makassar City** (Supervised by Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si and Ashar Prawitno, S.IP. M.Si).

Clean water is water used for daily needs whose quality meets health requirements and can be drunk if it has been cooked. Clean water that is healthy and of good quality and continues to flow is really needed by the community because it can improve the quality of people's lives. Water resources are a very basic need and affect the lives of many people, so the state is obliged to fulfill the basic needs of citizens in terms of water supply. The purpose of this research was to determine the role of government in providing clean water and the factors that influence the provision of clean water. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation methods. The data obtained were then analyzed through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that the Public Works Office as one of the local government instruments in providing clean water has role indicators, namely (1) planning activities in the field of clean water, (2) implementing activities in the field of clean water, (3) distributing tasks and controlling the implementation of activities in the field of clean water. From these indicators, it is found that the implementation of the role of the Public Works Office is still not optimal. This is based on the condition of the Untia Village area which is located in a coastal area so that the provision of clean water through the drilling system is still difficult to obtain clean water. Based on the results of the analysis of primary and secondary data, researchers identified several solutions that can encourage the success of clean water supply, namely providing clean water infrastructure in the form of tools or machines that can reduce underground salt levels for coastal areas, collaborating with clean water supply agencies, and making a master plan for clean water supply that is more planned and integrated.

Keywords: Clean Water, Provision, Role of Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) adalah memastikan bahwa masyarakat mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Program yang dilaksanakan untuk mengimplemetasikan *SDGs* di bidang akses air bersih dan sanitasi adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi manusia kebutuhan air sangat mutlak karena zat pembentuk tubuh manusia sebagian terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% dari bagian tubuh. Air di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut bahan-bahan makanan yang penting bagi tubuh. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia berupaya mendapatkan air yang cukup bagi dirinya (Suharyono, 1996).

Sumber daya air merupakan kebutuhan sangat mendasar dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal penyediaan air. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat (3) yaitu Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan landasan filosofis untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, termasuk air dalam kehidupan bernegara. Sehingga hak utama untuk menikmati manfaat dari sumber daya air adalah rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan deklarasi *the united nations committee on economic, cultural, and social right* yang menyatakan bahwa air bukan semata-mata komoditas ekonomis, tapi juga komoditas sosial dan budaya sehingga akses terhadap air merupakan hak asasi manusia.

Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Perkembangan kota yang cukup pesat disertai bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan manusia terhadap air bersih juga semakin bertambah dikarenakan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup manusia dalam pemenuhan aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut menjadikan kualitas layanan penyedia dan pengelola air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pelayanan air bersih merupakan komponen pelayanan publik yang sangat penting.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengemban tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk meningkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang – Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu perusahaan milik daerah, harus mengupayakan untuk dapat menunjang terwujudnya misi dan fungsi yang diemban maka pengelolaan sistem air bersih harus dilakukan dengan baik dan benar serta harus memenuhi kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai standar kriteria yang telah ditentukan. Serta penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini yakni bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Dalam seksi sanitasi dan air bersih Dinas Pekerjaan umum mempunyai tugas melakukan pendataan, pengkajian, pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan permukiman rawan air bersih. Hal tersebut merupakan pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang diprioritaskan pada masyarakat berdomisili pada daerah rawan air bersih.

Tabel 1
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap
Air Minum Layak Perkotaan Kota Makassar Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	1.257.782	968.421	995.720	1.074.339
2.	Jumlah seluruh Penduduk	1.659.777	1.480.480	1.482.877	1.489.912
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan (1/2 x 100)	75,78	65,41	65,71	72,35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, pada tahun 2021 jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang terlindungi sebesar 1.074.339 jiwa dari jumlah keseluruhan 1.489.912 penduduk atau 72,35%. Hal tersebut menunjukkan lebih dari ¼ penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih di kota makassar dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan sebagian besar dikelola PDAM sekitar 63,57% sedangkan 3,78% sistem non perpipaan sekitar berupa sumur dalam yang dibiayai APBD Kota Makassar.

Tingkat kebutuhan air bersih setiap tahunnya bergantung pada pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan

penduduk, maka semakin kompleks juga kebutuhan akan air bersih. Seperti halnya Kota Makassar yang terus berkembang dengan pesat disertai aktivitas penduduknya yang semakin berkembang sehingga tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih juga semakin meningkat. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Kota Makassar dikarenakan tingginya permintaan pelayanan air bersih, namun ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau air bersih salah satunya yaitu di Kelurahan Untia yang mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun.

Kelurahan Untia merupakan salah satu Kelurahan di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Luas Kelurahan Untia sebesar 2,89 km² dengan jumlah penduduk 2.589 Jiwa dan terletak pada ketinggian 1meter diatas permukaan laut yang merupakan kawasan pesisir. Kelurahan Untia berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu di sebelah utara, Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya di sebelah timur, Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Kelurahan Untia yang merupakan kawasan pesisir mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh gerakan pasang surut yang mengakibatkan air laut bercampur dengan air tawar sehingga kualitas air di Kelurahan Untia menjadi payau/asin. Serta masuknya industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia yang menggunakan air dengan skala besar dan

hanya menggunakan satu aliran perpipaan dengan masyarakat yang berasal dari PDAM. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena kawasan industri tersebut lebih banyak menarik air dibandingkan masyarakat dan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia.

Tabel 2
Kebutuhan Air Bersih Kawasan Industri Makassar

No.	Deskripsi	Standar Kebutuhan Air Industri Rata-Rata Per Hari (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m ³)			
			2019	2020	2021	2022
1.	Industri Makanan dan Minuman	65.000	29.200	25.904	31.804	37.776
2.	Industri Furniture Kayu dan Rotan		16.180	17.162	18.144	19.126
3.	Industri Kertas		5.653	7.097	6.831	7.449
4.	Industri Plastik		14.807	15.197	16.180	17.162
5.	Industri Bahan Bangunan		19.316	21.215	23.114	25.012
6.	Industri Alat Berat		47.403	50.699	53.996	57.293
7.	Industri Tekstil		41.292	44.106	47.403	50.699
8.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki		2.717	3.691	5.132	5.358
9.	Industri Farmasi/Produk Obat		41.02	42.69	55.26	60.27
10.	Industri Aluminium		16.941	15.389	16.837	18.285

Sumber: Makassar Dalam Angka, 2022

Berdasarkan hasil penelitian Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sulawesi Selatan (2020) Kelurahan Untia sebagai wilayah pesisir memiliki sumber daya air yang terbatas hal itu disebabkan oleh intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air di wilayah tersebut menjadi asin karena adanya pencampuran unsur air laut dan terganggunya kualitas air tanah akibat sanitasi lingkungan yang buruk dan ditambah dengan privatisasi dan penggunaan air yang dilakukan oleh industri. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir krisis air bersih di Kelurahan Untia yaitu dengan mengadakan alat filtrasi dengan metode penyaringan yang dapat memisahkan antara garam dan air. Namun, alat tersebut tidak bertahan lama dikarenakan sifatnya yang sensitif serta beratnya kemampuan alat untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Untia.

Pada sebuah laman berita online mengabarkan tentang warga Kelurahan Untia yang setiap tahunnya mengalami kesulitan air bersih. Dalam pemberitaan tersebut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Untia, mengatakan sejak kemarau warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu terjadi lantaran PDAM hanya memiliki satu pipa dengan industri dan kualitas dan kualitas sumur gali yang. Masyarakat mengaku miris dengan kehidupan di Kelurahan Untia lantaran kesulitan mendapatkan air bersih. Olehnya itu dalam berita tersebut, kata ibu Jamrud, secara pribadi mengatakan sumber air di Kelurahan Untia sangat mahal untuk mandi, mencuci, minum, dan keperluan lainnya yg menggunakan air semuanya dibeli dengan

harga Rp. 80.000 per hari. Menyikapi hal itu, Humas Perusahaan Air Minum Kota Makassar (PDAM), Muhammad Rusli mengaku, sampai saat ini air bersih memang masih sulit sampai di Kelurahan Untia. Namun, ia telah menyiapkan armada tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Serta observasi awal yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa Kelurahan Untia mengalami kekurangan air bersih dikarenakan penggunaan air dengan skala besar yang dilakukan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia dan minimnya pelayanan yang mengakibatkan air keran atau air bersih tidak lagi mengalir ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat di Kelurahan Untia harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya sebesar Rp.500.000– Rp.800.000 per bulan. Berbagai upaya yang dilakukan seperti pembuatan sumur gali tidak teraplikasikan dengan baik disebabkan pencemaran dari limbah industri dan kualitas air tersebut payau/asin sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembuatan sumur bor dan penampungan air yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi geografis wilayah yang berada di pesisir yang mengakibatkan air yang didapatkan dari hasil pengeboran masih payau. Hal tersebut sangat diperlukan perhatian

dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait penyediaan air bersih.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Untia terindikasi belum terlaksana secara optimal dan belum dapat ditangani secara tuntas dikarenakan minimnya sarana pelayanan air bersih serta buruknya kualitas lingkungan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih di Kelurahan Untia. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dan dijadikan bahan masukan dalam merumuskan peningkatan kualitas wilayah khususnya dalam penyediaan air bersih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Peran Pemerintah Daerah

2. 1. 1 Konsep Peran

Peran berasal dari kata “peran” yang artinya merupakan bagian dari atau memiliki pimpinan utama. Peranan atau *role* juga diartikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peran merujuk pada kelompok yang kurang lebih berperilaku homogen, yang didefinisikan oleh norma dan diharapkan oleh warga dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi perannya atau ekspektasi lainnya.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138)

2. 1. 2 Konsep Pemerintah Daerah

Dari segi bahasa, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu "Perintah" yang artinya "sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan". Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Sedangkan pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur kewenangan,

melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada.

Berkenaan dengan ilmu pemerintahan tersebut, Inu Kencana Syafii memberikan definisi sebagai berikut: ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasar berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu:

a. Desentralisasi

Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. 1. 3 Fungsi, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Rasyid (dalam Labolo, 2010: 32) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa fungsi, Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan dan mengatur jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sementara itu hak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah memuat:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar Pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Mengelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

2. 2 Pelayanan Publik

2. 2. 1 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok.

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. 2. 2 Prinsip – Prinsip Pelayanan Publik

Penyediaan pelayanan publik perlu mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa prinsip:

1. Prinsip kesederhanaan. Dalam prinsip ini pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus melalui prosedur dan sistem pelayanan yang tidak rumit, singkat, jelas dan mudah.
2. Prinsip kejelasan. Prinsip ini lebih mengutamakan pada pelaksanaan pelayanan yang harus didasarkan pada tata cara atau tata kerja yang telah ditetapkan dan ditangani oleh aparatur pelayanan yang handal dan profesional, serta bertanggung jawab dalam penanganan keluhan dan persoalan yang dialami masyarakat dalam dinamika pelayanan publik.
3. Prinsip kepastian waktu, prinsip ini menekankan pada efisiensi pelayanan publik. Jadi dalam memeberikan pelayanan publik kepada masyarakat, penyedia layanan sudah punya perkiraan waktu yang tepat terkait dengan produk layanan yang diberikan.
4. Prinsip akurasi, prinsip ini terkait dengan kesesuaian layanan. Artinya bahwa produk yang harus diberikan kepada masyarakat adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki status legalitas yang sah.

5. Prinsip pelayanan tidak diskriminatif. Prinsip ini berkaitan dengan asas kesamaan hak dengan tidak menjadikan perbedaan menjadi suatu alasan untuk tidak bisa memperoleh layanan. Meskipun masyarakat adalah kelompok yang plural dan heterogen, pelayanan publik tetap dilaksanakan tanpa harus membandingkan satu sama lain dengan melihat perbedaan yang ada.
6. Prinsip kemudahan Akses. Kemudahan akses yang dimaksud adalah lokasi jangkauan untuk akses pelayanan publik, ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan juga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
7. Prinsip kelengkapan Sarana dan prasarana menjadi prinsip penting lainnya dalam pelayanan publik. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk ketersediaan teknologi informasi penunjang layanan adalah aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
8. Prinsip kejujuran dan kecermatan. Prinsip ini terkait dengan profesionalitas penyedia pelayanan public. Aparatur harus bersikap jujur kepada penerima layanan atau masyarakat sehingga dapat dengan mudah mengarahkan masyarakat dalam proses pelayanan. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu

mengedapankan kualitas dalam menciptakan pelayanan yang profesional.

2. 2. 3 Asas Pelayanan Publik

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, para birokrat memiliki pedoman khusus yang mejadi acuan dalam penyelenggaran pelayanan publik. Pedoman para birokrat salah satunya adalah asas-asas pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adapun asas pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 yaitu:

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

2. 3 Penyediaan Air bersih

2. 3. 1 Pengertian Air Bersih

Air bersih merupakan air yang layak dipakai oleh masyarakat berdasarkan kualitas secara fisik, kimia, dan biologis. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan lancar, maka air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu. Menurut Wahyuni (2017) air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung

mineral/kuman-kuman yang membahayakan tubuh, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Dalam dunia kesehatan khususnya kesehatan lingkungan, perhatian air dikaitkan sebagai faktor perpindahan/penularan penyebab penyakit (agent). Air membawa penyebab penyakit dari kotoran (faeces) penderita, kemudian sampai ke tubuh orang lain melalui makanan, susu dan minuman. Air juga berperan untuk membawa penyebab penyakit non mikrobial seperti bahan-bahan toxic yang dikandungnya. Penyakit-penyakit infeksi yang biasanya ditularkan melalui air adalah typhus abdominalis, cholera, dysentri baciller dan lain-lain. Peracunan logam juga dapat terjadi melalui media air.

Saat ini masalah penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus baik bagi negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai halnya pula Negara berkembang lainnya, tidak luput dari permasalahan penyediaan air bersih bagi masyarakatnya. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air yang bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama pada daerah perdesaan dan sumber air bersih yang ada belum dapat dimanfaatkan secara

maksimal. Bahkan pada beberapa tempat di kota-kota besar, sumber air bersih yang telah dimanfaatkan oleh PDAM telah tercemari oleh limbah industri dan limbah domestik, sehingga beban dalam segi pengelolaan air bersihnya semakin meningkat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam rangka penyediaan kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, Pemerintah RI mencanangkan program peningkatan penyediaan air bersih pada daerah perkotaan (urban) dan daerah perdesaan (rural urban) melalui pipanisasi dan pemanfaatan sumber air yang ada secara optimal.

Menurut (NSPM kimpraswil, 2002) beberapa pengertian tentang air bersih adalah sebagai berikut:

1. Sebagai air yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk baku mutu air bersih Yang berlaku yang siap diminimum setelah dimasak.
2. Air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga.
3. Air yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari hari dengan kualitas yang memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang ditetapkan.
4. Air yang aman digunakan untuk air minum dan pemakian-pemakain lain kerana telah bersih dari bibit-bibit penyakit, zat kimia organik dan anorganik, serta zat-zat radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan.

5. Air bersih memenuhi syarat kesehatan:
 - a. Air yang tidak berwarna (bening atau tembus pandang).
 - b. Tidak berubah rasanya dan baunya.
 - c. Tidak mengandung zat-zat organik dan kuman kuman yang mengganggu Kesehatan.

2. 3. 2 Sistem Penyediaan Air Bersih

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Dalam sistem penyediaan air bersih, sumber air merupakan satu komponen yang mutlak dan harus ada, karena tanpa sumber air sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing sumber air serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat membantu di dalam pemilihan air baku untuk suatu sistem penyediaan air bersih. Secara umum sumber air yang dapat digunakan untuk penyediaan air bersih dikelompokkan sebagai berikut:

1. Air permukaan

Air permukaan yang mengalir di permukaan bumi akan membentuk air permukaan. Air permukaan yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku air bersih adalah:

- a. Air waduk (berasal dari air hujan)
- b. Air sungai (berasal dari air hujan dan mata air)
- c. Air danau (berasal dari air hujan, air sungai atau mata air)

Pada umumnya air permukaan telah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Kontaminan atau zat pencemar ini berasal dari buangan domestik, buangan industri dan limbah pertanian. Zat-zat pencemar tersebut antara lain Total Suspended Solid (TSS), yang berpengaruh pada kekeruhan, zat-zat organik sebagai KMnO_4 , logam berat dari air limbah industri misalnya industri baterai yang menghasilkan Pb (timbal).

Kontinuitas dan kuantitas dari air permukaan dapat dianggap tidak menimbulkan masalah yang besar untuk penyediaan air bersih yang memakai bahan baku air permukaan

2. Air Laut

Air laut merupakan air yang berasal dari samudera atau laut. Air laut punya personalitas dasar asin disebabkan kandungan Natrium Klorida sebanyak 3%, gas terlarut, bahan organik dan partikel yang tak terlarut. Dengan demikian, air laut tidak bisa dikonsumsi masyarakat karena tidak memenuhi syarat air bersih untuk dijadikan air minum.

3. Air Tanah

Air tanah adalah semua jenis air yang terletak di bawah tanah, biasanya memerlukan cara tertentu untuk menaikkan permukaan. Misalnya dengan membuat sumur atau dengan menggunakan pompa. Air tanah banyak mengandung garam dan mineral yang terlarut pada waktu air melalui lapisan-lapisan tanah. Secara praktis air tanah adalah bebas dari polutan karena berada di bawah permukaan tanah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa air tanah dapat tercemar oleh zat-zat yang mengganggu kesehatan seperti kandungan Fe, Mn, kesadahan yang terbawa oleh aliran permukaan tanah. Bila ditinjau dari kedalaman air tanah maka air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal mempunyai kualitas lebih rendah dibanding kualitas air tanah dalam. Hal ini disebabkan air tanah dangkal lebih mudah mendapat kontaminasi dari luar dan fungsi tanah sebagai penyaring lebih sedikit.

Dari segi kuantitas, apabila air tanah dipakai sebagai sumber air baku air bersih adalah relatif cukup. Tetapi bila dilihat dari segi kontinuitasnya maka pengambilan air tanah harus dibatasi, karena dikhawatirkan dengan pengambilan yang secara terus menerus akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Karena air di alam merupakan rantai yang panjang menurut siklus hidrologi, maka bila terjadi penurunan muka air tanah kemungkinan kekosongannya akan diisi oleh air laut. Peristiwa ini biasa disebut intrusi air laut

4. Mata Air

Mata Air Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari air tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan memiliki kualitas yang sama dengan air tanah dalam.

Dari segi kualitas, mata air adalah sangat baik bila dipakai sebagai air baku, karena berasal dari dalam tanah yang muncul ke permukaan tanah akibat tekanan, sehingga belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemar. Biasanya lokasi mata air merupakan daerah terbuka, sehingga mudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar. Contohnya banyak ditemui bakteri E.Coli pada air mata air.

Dilihat dari segi kuantitasnya, jumlah dan kapasitas mata air sangat terbatas sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan sejumlah penduduk tertentu. Begitu pula bila mata air tersebut

terus-menerus kita ambil semakin lama akan habis dan terpaksa penduduk mencari sumber mata air yang baru.

2. 3. 3 Persyaratan Dalam Penyediaan Air Bersih

Ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih. Persyaratan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat kualitas, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping.
2. Syarat kuantitas, air bersih yang masuk ke dalam bangunan atau masuk ke dalam sistem plambing harus memenuhi syarat dari aspek kuantitas, yaitu kapasitas air bersih harus mencukupi untuk berbagai kebutuhan bangunan tersebut. Untuk menghitung besarnya kebutuhan air bersih dalam bangunan didasarkan pada pendekatan jumlah penghuni bangunan dan jumlah unit beban alat plambing.
3. Syarat kontinuitas, persyaratan kontinuitas untuk penyediaan air bersih sangat erat hubungannya dengan kuantitas air yang tersedia yaitu air baku yang ada di alam. Artinya, kontinuitas disini adalah bahwa air baku untuk air bersih tersebut dapat

diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan.

Air yang digunakan sehari-hari harus memenuhi standar mutu air bersih Banyak yang beranggapan bahwa air yang jernih saat terlihat secara kasat mata, sudah pasti aman untuk digunakan padahal tidak semua air jernih layak untuk digunakan Berikut ini beberapa kriteria atau syarat air bersih yaitu:

1. Jernih dan tidak keruh

Air yang tidak terkontaminasi zat pengaruh dan zat lainnya yang berbahaya. Air keruh bisa terjadi karena adanya campuran dari partikel yang tidak larut debu dan tanah sehingga bakteri yang ada di dalamnya menyebabkan air menjadi keruh.

2. Tidak berwarna

Warna yang tercampur didalam air dapat dicurigai sebagai suatu unsur berbahaya yang dapat mengganggu Kesehatan. Limbah pabrik yang langsung dibuang kesungai tanpa di proses terlebih dahulu atau warga yang sering membuang sampah dan bangkai hewan ke sungai secara sembarang merupakan beberapa kasus yang dapat mengubah air.

3. Tidak berasa

Air bersih yang layak dikonsumsi biasa tidak berasal atau berasal tawar tanpa ada tambahan rasa, pahit, dan

menemukan air yang berasa pahit dan asin dan mengolah terlebih dahulu sebelum menggunakannya.

4. Tidak berbau

Air bersih selayaknya tidak berbau apalagi berbau menyengat jika dicium Terlebih dahulu jika air tersebut berada ditempat yang mempunyai bau yang tidak dapat dikatakan air bersih.

5. Tidak mengandung zat kimia berlebihan dan berbahaya

Air yang bersih dan sehat biasa mengandung beberapa zat yang baik untuk kesehatan, namun kandungan zat dengan jumlah yang kurang atau berlebihan dapat mengakibatkan gangguan pada manusia.

6. Bebas dari segala bakteri

Air bersih adalah bebas dari segala bakteri. Bakteri ini biasa hidup di dalam usus manusia dan hewan, maka ada kemungkinan dapat terkena infeksi bakteri yang berakibat muncul penyakit diare ringan.

Dalam tinjauan aspek teknis, penyediaan air bersih dibedakan menjadi dua sistem yaitu:

1. Sistem penyediaan air bersih individual

Sistem penyediaan air bersih individual merupakan sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan pribadi atau pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari tanah. Sistem penyediaan air bersih ini melalui sumur gali, pompa tangan, dan sumur bor.

2. Sistem penyediaan air bersih komunitas

Sistem penyediaan air bersih komunitas adalah suatu sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota dan untuk pelayanan yang menyeluruh. Sumber air yang digunakan umumnya air sungai atau danau yang memiliki kuantitas cukup besar. Sistem penyediaan air bersih ini melalui tangki air bawah tanah, tangki air di atas atap, pompa, dan perpipaan.

Sistem penyediaan air bersih adalah usaha-usaha teknis yang dilakukan untuk mengalirkan air yang belum bersih (air baku) yang belum bersih dari sumber air melalui system pengolahan tertentu hingga didapatkan air yang memenuhi standar lalu disalurkan ke konsumen /pemakai (sudah menjadi air bersih) (Anwar,1986). Secara khusus penyediaan air bersih ditentukan pada peningkatan kapasitas produksi serta penambahan jumlah sambungan rumah (SR). Upaya yang di tempuh oleh pemerintah khususnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah berada pada daerah terpencil dan sulit air. Pada Pelita V dilakukan penetapan strategi utama yang berupa pembangunan hidran umum (HU) dan terminal air (TA), yang kemudian di lanjutkan dengan pemasangan sambungan ke rumah-rumah sesuai perkembangan kemampuan masyarakat.

